

Analisis Tata Kelola Kelembagaan, Otomasi Sistem, dan Problematika Sertifikasi SDM: Studi kasus Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

Faizan Azhar Muhafiz, Universitas PGRI Madiun

Bima, Universitas PGRI Madiun

muhafizazhar@gmail.com

bima04981@gmail.com

Abstract: *The existence of regional public libraries plays a dual role, both as providers of public literacy services and as mentoring institutions for Learning Resource Centers (LRC) at the school level. This study aims to examine the dynamics of institutional governance, budget allocation, librarian certification obstacles, and the implementation of service automation carried out by the Madiun City Library and Archives Department. Using a qualitative method with a case study design, data were gathered through in-depth interviews, direct observations, and administrative document reviews. The results indicate that the department has systematically executed management functions through the integration of APBD and DAK budgeting. Nevertheless, a critical bottleneck arises in the limited number of functional librarians due to administrative delays in the national certification system at the central government level. Professionally, the adoption of INLISLite for internal operations and the replication of SLiMS for mentored schools are running well, although circulation policies are still restricted to local ID card holders to safeguard assets. The partnership synergy has proven effective in progressively fostering the standardization of mentored elementary school libraries.*

Keywords: *Library Governance, Service Automation, INLISLite, SLiMS, Librarian Certification*

Abstrak: Keberadaan perpustakaan umum di tingkat daerah memegang peran ganda, baik sebagai penyedia layanan literasi publik maupun sebagai instansi pembina Pusat Sumber Belajar (PSB) di tingkat sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas dinamika tata kelola kelembagaan, alokasi anggaran, hambatan sertifikasi pustakawan, serta implementasi otomasi pelayanan yang dijalankan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun. Menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen administratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dinas telah menjalankan fungsi manajemen secara sistematis lewat integrasi penganggaran APBD dan DAK. Kendati demikian, kendala krusial muncul pada aspek keterbatasan pustakawan fungsional akibat kemacetan sistem sertifikasi nasional di tingkat pusat. Pada aspek teknologi, penggunaan INLISLite untuk internal dan replikasi SLiMS untuk sekolah binaan telah berjalan, meski kebijakan sirkulasi masih dibatasi KTP lokal demi keamanan aset. Sinergi kemitraan yang dilakukan terbukti mampu mendorong standardisasi perpustakaan sekolah dasar binaan secara bertahap. Abstrak artikel harus menuliskan hal-hal umum mengenai penelitian kepada pembaca.

Kata kunci: Tata Kelola Perpustakaan, Otomasi Pelayanan, INLISLite, SLiMS, Sertifikasi Pustakawan



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di dalam ekosistem pendidikan modern, perpustakaan dan laboratorium sekolah tidak lagi sekadar berfungsi sebagai fasilitas pendukung, melainkan diakui sebagai Pusat Sumber Belajar (PSB) yang krusial (Prastowo, 2020). Hal ini sejalan dengan substansi kajian dalam mata kuliah Pengelolaan Perpustakaan dan Laboratorium Sekolah, yang menekankan bahwa efektivitas proses pembelajaran sangat bergantung pada bagaimana sarana prasarana, koleksi bahan pustaka, dan fasilitas laboratorium dikelola secara sistematis. Pengelolaan yang ideal menuntut penerapan fungsi-fungsi manajemen yang matang, mulai dari perencanaan anggaran, pengorganisasian sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, klasifikasi dan pengolahan koleksi yang presisi, hingga adopsi teknologi otomasi untuk menyederhanakan layanan sirkulasi informasi (Yusuf, 2021).

Namun, dalam praktiknya, tata kelola pusat sumber belajar di tingkat sekolah, khususnya Sekolah Dasar (SD), sering kali menghadapi berbagai keterbatasan internal. Banyak perpustakaan sekolah yang masih dikelola secara konvensional, kekurangan pustakawan berlatar belakang linear, serta belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan Nasional RI, 2022). Di sinilah pentingnya peran eksternal dari instansi pembina tingkat daerah, seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun. Sebagai representasi urusan pemerintahan bidang perpustakaan di tingkat lokal, dinas ini memegang peran strategis sebagai mentor dan fasilitator yang menjembatani kesenjangan tata kelola di sekolah-sekolah binaannya.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun secara struktural bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan teknis perpustakaan, mengelola anggaran (baik APBD maupun Dana Alokasi Khusus), serta mengupayakan sertifikasi kompetensi bagi pustakawan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Republik Indonesia, 2007). Lebih jauh lagi, program pembinaan yang mereka lakukan, seperti asistensi akreditasi perpustakaan sekolah, penyelarasan sistem otomasi berbasis platform terbuka (seperti SLiMS dan INLISLite), hingga penyediaan layanan penunjang seperti perpustakaan keliling, menjadi contoh nyata bagaimana konsep manajemen perpustakaan yang dipelajari di bangku perkuliahan dioperasionalkan di dunia kerja nyata. Oleh karena itu, menganalisis tata kelola pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun bukan hanya memberikan gambaran mengenai birokrasi literasi di tingkat daerah, melainkan juga menjadi refleksi kritis dan studi kasus yang komprehensif terhadap implementasi nyata dari materi Pengelolaan Perpustakaan dan Laboratorium Sekolah dalam skala makro.

Rumusan Masalah dan Kesenjangan (Research Gap)

Secara teoretis, pengelolaan perpustakaan umum daerah harus berjalan optimal apabila didukung oleh anggaran yang memadai, teknologi otomasi yang mapan, serta ketersediaan pustakawan fungsional yang tersertifikasi secara kompeten (Yusuf, 2021). Namun, pada realitas operasionalnya, terdapat kesenjangan (*gap*) yang signifikan antara regulasi ideal dan kondisi aktual di lapangan.

Pertama, dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan jumlah pustakawan fungsional bersertifikat masih menjadi hambatan utama. Proses sertifikasi profesi terhambat oleh kendala teknis pada sistem administrasi ujian kompetensi di tingkat pusat (Perpustakaan Nasional RI) selama setahun terakhir (Sudarsono, 2020).

Kedua, dari aspek Kebijakan Pelayanan dan Keamanan Aset, penerapan sistem otomasi berbasis *Integrated Library System* (INLISLite) seharusnya meningkatkan inklusivitas akses peminjaman. Namun, tingginya risiko kehilangan aset buku memaksa pengelola menerapkan kebijakan restriktif, yaitu membatasi hak pinjam bawa pulang hanya

untuk warga yang memiliki KTP lokal (Kota dan Kabupaten Madiun). Hal ini memicu dilema antara upaya peningkatan jangkauan literasi dan penyelamatan aset daerah (Saleh, 2020). Ketiga, dari aspek Sinergi Kewilayahan, sebagai pembina perpustakaan di tingkat kelurahan dan sekolah dasar (SD), dinas menghadapi tantangan dalam menyeragamkan tata kelola digital di sekolah dasar mitra yang secara struktural belum mandiri dalam mengadopsi sistem otomasi perpustakaan.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tata kelola kelembagaan, mekanisme penyusunan program kerja berbasis *bottom-up*, serta alokasi anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun.
2. Mengidentifikasi kendala riil dalam pengembangan kompetensi profesi pustakawan serta implementasi sistem otomasi pelayanan (INLISLite) di tengah pembatasan akses berbasis risiko.
3. Merumuskan strategi kolaborasi yang dijalankan oleh dinas dalam melakukan pembinaan dan akreditasi pada perpustakaan sekolah dasar (SD) di wilayah Kota Madiun.

METODE

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (Sugiyono, 2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami, dan menggambarkan secara mendalam fenomena kontemporer terkait tata kelola kelembagaan, kebijakan anggaran, manajemen SDM, serta digitalisasi pelayanan. Melalui metode ini, prinsip-prinsip manajemen yang dipelajari secara teoretis dalam mata kuliah Pengelolaan Perpustakaan dan Laboratorium Sekolah dapat dikontekstualisasikan dengan dinamika praktis yang terjadi di lapangan.

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa instansi ini merupakan pusat pembina perpustakaan di tingkat kota yang telah mengadopsi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (Perpustakaan Nasional RI, 2022). Objek penelitian difokuskan pada dua aspek utama: manajemen internal perpustakaan umum daerah (anggaran, SDM, otomasi INLISLite, preservasi) dan fungsi pembinaan eksternal pada perpustakaan sekolah dasar (SD) mitra.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. **Data Primer:** diperoleh langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci (*key informants*), yaitu jajaran pengelola Bidang Perpustakaan yang terdiri dari Staff Tim Kerja (Katimja) Pembudayaan Kegemaran Membaca serta Staff Tim Kerja (Katimja) Pengelolaan Perpustakaan dan Naskah Kuno.
2. **Data Sekunder:** diperoleh melalui teknik dokumentasi bukti naskah kuno dan pelayanan yang tersedia di Perpustakaan Kota Madiun

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi teknik yang meliputi wawancara terstruktur, dokumentasi naskah kuno, dan observasi deskriptif terhadap fasilitas fisik (seperti OPAC, *Kids Corner*, dan ruang sirkulasi). Proses analisis data merujuk pada model analisis kualitatif interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data secara naratif-tabular, dan penarikan kesimpulan secara teoretis.

HASIL PENELITIAN

Manajemen Kelembagaan dan Kebijakan Anggaran

Sebagai Unit Pelaksana Teknis daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun menerapkan fungsi perencanaan (*planning*) secara terintegrasi melalui alur birokrasi berjenjang. Alur ini menunjukkan penyusunan program kerja perpustakaan menggunakan pendekatan *bottom-up* yang diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah untuk mendongkrak skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Madiun (Yusuf, 2021). Dari aspek penganggaran (*budgeting*), kemandirian program layanan didukung oleh diversifikasi anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*):

1. **APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah):** membiayai belanja pegawai, operasional rutin, pemeliharaan gedung, dan pengadaan buku fisik.
2. **DAK (Dana Alokasi Khusus) Subbidang Perpustakaan:** bantuan dari Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) untuk stimulus percepatan sarana prasarana fisik sesuai SNP (Perpustakaan Nasional RI, 2022).
3. **APBD Provinsi Jawa Timur:** berupa dana stimulan untuk bantuan stimulus program literasi regional.

Analisis Struktur Organisasi dan Problematika SDM

Struktur organisasi Bidang Perpustakaan secara fungsional dibagi menjadi dua tim kerja utama di bawah naungan Kepala Bidang Perpustakaan. Meskipun pembagian struktur organisasi sudah ideal, analisis kapasitas SDM menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar (*gap*) antara beban kerja dan jumlah pustakawan fungsional. Dari total 10 staf yang dimiliki:

1. **Tim Pembudayaan Kegemaran Membaca (3 orang):** terdiri dari 2 PNS Pustakawan Ahli dan 1 P3K penuh waktu.
2. **Tim Pengelolaan Naskah Kuno (7 orang):** terdiri dari 2 PNS Pustakawan dan 5 P3K paruh waktu.

Kondisi ini menandakan kekurangan tenaga ahli. Hambatan utama pengembangan kompetensi terletak pada sistem administrasi sertifikasi nasional. Gangguan teknis pada server Uji Kompetensi (Ujikom) yang dikelola oleh Perpusnas RI dalam setahun terakhir menyebabkan proses alih jalur fungsional staf pendukung menjadi mandek, yang menurut Sudarsono (2020) berpotensi memperlambat transfer pengetahuan manajerial kepada perpustakaan sekolah binaan.

Pengadaan, Pengolahan, dan Analisis Sistem Otomasi

Pengadaan bahan pustaka dilakukan melalui kombinasi pembelian langsung (e-katalog/SIPLah), hibah, dan program pelestarian naskah kuno daerah yang melibatkan insentif wali kota. Dalam tahap pengolahan, perpustakaan ini menerapkan sistem klasifikasi

DDC (*Dewey Decimal Classification*) dengan alat bantu digital aplikasi e-DDC untuk mempercepat proses penentuan nomor panggil secara presisi (Lasa, 2021).

Untuk layanan sirkulasi, dinas menggunakan aplikasi INLISLite, sedangkan sekolah dasar binaan diarahkan menggunakan SLiMS. Perbandingan kedua sistem tersebut disajikan pada **Tabel 1**.

TABEL 1. *Perbandingan sistem otomasi INLISLite dan SLiMS*

Aspek	INLISLite	SLiMS
Pengguna	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun (internal)	Perpustakaan sekolah dasar (SD) binaan
Pengembang	Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas)	Komunitas <i>open source</i> (Senayan)
Lisensi	<i>Freeware</i> dari Perpusnas	Open source, tanpa biaya
Cakupan fungsi	Otomasi skala dinas/kota, terhubung basis data nasional	Otomasi skala sekolah, ringan sesuai kapasitas SD

Dilema kebijakan sirkulasi muncul dari upaya memitigasi risiko kehilangan aset buku yang sulit dilacak: pengelola menerapkan kebijakan pembatasan hak pinjam bawa pulang hanya untuk warga ber-KTP Kota dan Kabupaten Madiun. Dari kacamata manajemen risiko, langkah ini rasional untuk memproteksi aset daerah, namun secara teoretis membatasi asas inklusivitas pelayanan publik perpustakaan umum (Saleh, 2020).

Sarana Prasarana dan Preservasi Bahan Pustaka

Fasilitas fisik yang tersedia (ruang baca ber-AC, *Kids Corner*, akses Wi-Fi, dan komputer OPAC) telah memenuhi standar kenyamanan SNP. Untuk menjamin kelangsungan fisik koleksi, dinas menerapkan manajemen preservasi ganda (Lasa, 2021):

1. **Preservasi Preventif:** penyampulan buku dengan mika plastik, pengaturan suhu ruangan konstan menggunakan AC, pembersihan debu dengan vakum, serta fumigasi berkala untuk membasmi rayap.
2. **Preservasi Kuratif:** penjilidan ulang (binding) dan pengeleman kembali bagi buku-buku yang mengalami kerusakan fisik akibat frekuensi pemakaian tinggi.

Pembinaan Perpustakaan Sekolah Dasar (SD)

Dalam perspektif mata kuliah Pengelolaan Perpustakaan dan Laboratorium Sekolah, perpustakaan sekolah harus diposisikan sebagai jantung akademis sekolah (Wicaksono, 2020). Dinas Perpustakaan menjalankan peran pembina eksternal ini melalui tiga pilar sinergi: memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) tata kelola dasar kepada guru penanggung jawab, melakukan Asistensi Akreditasi agar perpustakaan SD mencapai standar SNP, serta melakukan Modernisasi Otomasi dengan memigrasi pencatatan manual sekolah ke sistem aplikasi *open-source* SLiMS yang ramah anggaran. Ketiga pilar ini sejalan dengan konsep Pusat Sumber Belajar yang aktif sebagaimana dikemukakan Prastowo (2020).

PEMBAHASAN

Secara keseluruhan, temuan-temuan di atas menggambarkan tegangan klasik dalam manajemen pelayanan publik, yaitu antara kepatuhan terhadap prosedur pengendalian aset dan pemenuhan prinsip aksesibilitas informasi bagi masyarakat luas. Kebijakan pembatasan KTP lokal memang menekan risiko kehilangan buku, tetapi kebijakan tersebut secara tidak langsung mempersempit jangkauan layanan publik yang idealnya bersifat inklusif, sehingga dibutuhkan solusi mitigasi risiko yang tidak mengorbankan aksesibilitas.

Pola serupa juga tampak pada isu SDM, keterbatasan pustakawan fungsional bukan semata persoalan kebijakan lokal, melainkan konsekuensi dari kerentanan sistem

administrasi di tingkat pusat, sehingga penguatan tata kelola daerah perlu diimbangi dengan perbaikan infrastruktur birokrasi nasional. Sebaliknya, keberhasilan dinas membina perpustakaan SD melalui SLiMS dan asistensi akreditasi menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya di tingkat sekolah dapat diatasi melalui kemitraan eksternal yang terstruktur, sehingga pola ini layak dijadikan praktik baik untuk direplikasi oleh daerah lain.

SIMPULAN

Kesimpulan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun telah mengimplementasikan fungsi manajemen (POAC) secara sistematis, di mana penyusunan program bersumber dari bawah (*bottom-up*) dan didanai secara sehat lewat kombinasi APBD serta DAK Perpustakaan.

Akan tetapi, terdapat kendala kritis berupa kelangkaan pustakawan fungsional akibat kemacetan server Ujikom Perpustakaan di tingkat pusat. Selain itu, manajemen risiko aset memaksa diterapkannya kebijakan restriktif sirkulasi berbasis KTP lokal yang memicu dilema inklusivitas layanan.

Peran pembinaan eksternal dinas berhasil mengakselerasi standarisasi perpustakaan sekolah dasar (SD) mitra di Kota Madiun melalui pembinaan akreditasi SNP dan migrasi teknologi berbasis SLiMS.

Saran

Bagi Dinas Perpustakaan Madiun, disarankan untuk mengembangkan inovasi sistem jaminan non-tunai (*digital deposit*) bagi pemustaka ber-KTP luar Madiun sebagai alternatif pengganti pembatasan wilayah, sehingga asas aksesibilitas informasi tetap terjaga tanpa mengorbankan keamanan aset. Replikasi sistem otomasi SLiMS juga perlu terus diperluas secara bertahap ke seluruh sekolah dasar binaan yang belum terjangkau.

Bagi Perpustakaan Nasional RI selaku instansi pembina di tingkat pusat, perbaikan infrastruktur digital dan stabilitas server sistem administrasi Ujikom perlu segera dilakukan agar tidak terus menghambat pengembangan karier serta pemenuhan kuota pustakawan fungsional di daerah.

Bagi pihak sekolah dasar, khususnya guru atau tenaga yang ditunjuk mengelola perpustakaan, disarankan untuk lebih proaktif memanfaatkan program bimbingan teknis dan asistensi akreditasi yang telah disediakan dinas, alih-alih menunggu secara pasif. Migrasi dari pencatatan manual ke aplikasi SLiMS yang telah disediakan secara gratis juga perlu segera dituntaskan, disertai penerapan praktik pelestarian sederhana seperti penyampulan buku dan penataan rak sesuai klasifikasi dasar, sehingga pengelolaan perpustakaan tetap berjalan optimal meskipun belum memiliki tenaga pustakawan bersertifikat.

Bagi akademisi dan praktisi pendidikan, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara kuantitatif dampak migrasi sistem otomasi SLiMS di perpustakaan sekolah dasar terhadap peningkatan minat baca dan hasil belajar siswa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Lasa, H. S. (2021). *Manajemen dan preservasi perpustakaan*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
2. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
3. Perpustakaan Nasional RI. (2022). *Standar Nasional Perpustakaan (SNP) bidang perpustakaan sekolah dan umum*. Jakarta: Perpustakaan Press.
4. Prastowo, A. (2020). *Pengembangan bahan ajar dan pusat sumber belajar di era digital*. Depok: Rajawali Pers.
5. Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
6. Saleh, A. R. (2020). *Membangun perpustakaan digital: Teori dan praktik pengamanan aset informasi*. Bogor: IPB Press.
7. Sudarsono, B. (2020). *Kompetensi dan sertifikasi pustakawan Indonesia di era disrupsi*. Jakarta: Sagung Seto.
8. Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Ed. 2). Bandung: Alfabeta.
9. Wicaksono, H. (2020). *Manajemen perpustakaan sekolah berbasis standarisasi nasional*. Surabaya: Jaring Pena.
10. Yusuf, S. (2021). *Manajemen perpustakaan modern: Pendekatan teori dan praktik*. Bandung: Rosda.